

**ANALISIS PENGARUH BELANJA DAERAH
TERHADAP PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Ahmad Zakariya
125020100111048**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN
DAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR**

Yang disusun oleh :

Nama : Ahmad Zakariya
NIM : 125020100111048
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Juli 2016

Malang, 27 Juli 2016

Dosen Pembimbing,



Dr. Susilo, SE, MS

NIP. 19601030 198601 1 001

Analisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pembangunan dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Ahmad Zakariya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
ahmadzaka1193@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang menyentuh berbagai aspek baik sisi ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu dalam mengatasi permasalahan kemiskinan tidak hanya fokus hanya dari pembangunan ekonomi saja melainkan juga menyentuh aspek pembangunan sosial. Kebijakan fiskal melalui belanja daerah merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah yang memiliki pengaruh dalam meningkatkan pembangunan dan mengurangi kemiskinan. Untuk melihat pengaruh tersebut dalam penelitian ini menggunakan model dengan pendekatan Partial Least Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan dalam mempengaruhi pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Selanjutnya variabel pembangunan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel pembangunan sosial memiliki pengaruh negatif dan signifikan dalam kemiskinan
Kata kunci: Belanja daerah, pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, kemiskinan

A. PENDAHULUAN

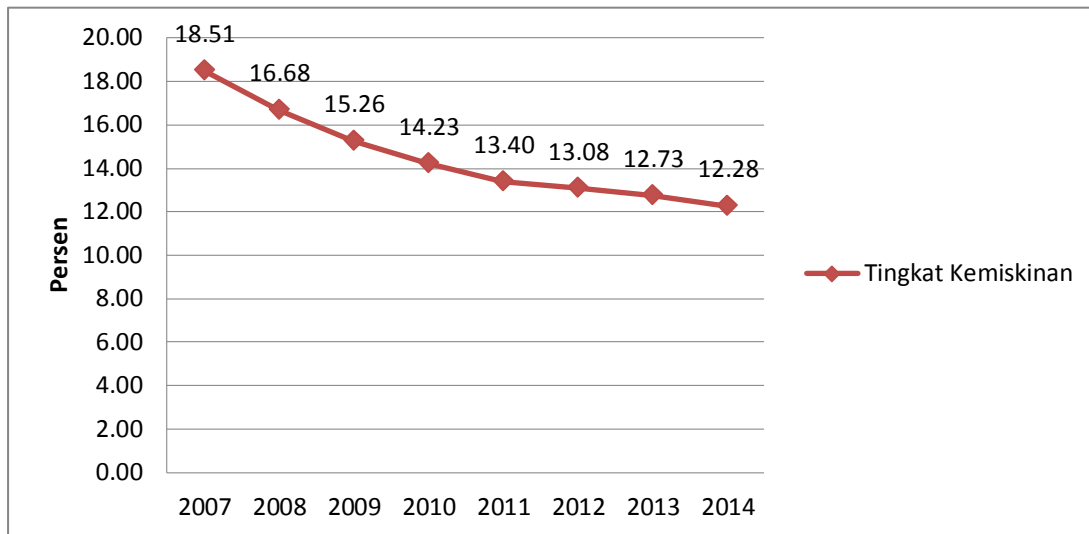
Kemiskinan merupakan permasalahan global yang dihadapi oleh seluruh dunia saat ini khususnya pada negara berkembang. Dalam konteks pembangunan, kemiskinan ini menjadi masalah serius yang dihadapi dikarenakan dampak yang sangat luas ditimbulkan yang menyangkut segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun non ekonomi.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi hal yang sejak lama tidak bisa dihilangkan dalam proses pembangunan di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia tercermin dari masih banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia.

Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin masih didominasi oleh provinsi di pulau Jawa dengan jumlah sekitar 15,3 juta jiwa dari 28,5 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia. Jumlah penduduk miskin terbesar berada di provinsi Jawa Timur yakni sebesar 4,77 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin terbesar kedua berada di provinsi Jawa Tengah dengan jumlah sebesar 4,50 juta jiwa. Sementara itu di posisi ketiga, Jawa Barat dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4,48 juta jiwa.

Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang mempunyai kontribusi besar dalam perekonomian nasional masih dihadapkan persoalan yang besar dalam kemiskinan. Kemiskinan masih menyisakan permasalahan terbesar dalam cakupan pembangunan di Jawa Timur. Permasalahan kemiskinan di provinsi Jawa Timur yaitu masih tingginya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, meskipun persentase penduduk miskin terhadap populasi cenderung menurun setiap tahunnya. Namun bila dicermati sejak tahun 2010 pengurangan kemiskinan mengalami perlambatan dalam penurunannya. Hal ini dapat ditunjukkan dalam grafik berikut.

Gambar 1.1 : Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2014



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur (diolah penulis)

Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan kemiskinan di Jawa Timur yaitu tidak meratanya akses setiap individu terhadap sumberdaya ekonomi, permasalahan ketenagakerjaan, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan akses kepada pelayanan dasar yang buruk. Berbagai kebijakan pembangunan telah dirumuskan pemerintah Jawa Timur agar persoalan kemiskinan dapat diselesaikan. Diantaranya yaitu melalui peran kebijakan fiskal melalui belanja daerah. Dalam pendekatan Keynesian, kebijakan fiskal dalam bentuk pengeluaran pemerintah baik belanja barang dan jasa, maupun belanja modal dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang nantinya akan berdampak pada pengurangan kemiskinan. Penyediaan dana belanja daerah khususnya dalam bidang pelayanan dasar cenderung akan meningkatkan pembangunan, hal ini dikarenakan kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mehmood (2010) juga menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki peran besar dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu negara diantaranya melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pengeluaran pada bidang pendidikan dan kesehatan akan memberikan kontribusi secara langsung dalam pembangunan sumber daya manusia. Sedangkan pengeluaran infrastruktur berperan dalam menunjang jalannya aktivitas perekonomian. Dalam konteks ekonomi, infrastruktur merupakan Social Overhead Capital yaitu barang-barang modal yang menjadi sarana penting bagi aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, sistem irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, jaringan komunikasi, pelabuhan, dan sebagainya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dalam mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah dan kesejahteraan suatu masyarakat.

Agbonkhese (2014) dalam penelitiannya yang berjudul *Impact Of Public Expenditure On The Growth Of Nigerian Economy* menyimpulkan adanya hubungan positif pengeluaran pemerintah dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal senada juga diungkapkan oleh Fan (2005) dalam penelitian yang berjudul *Public Investment and Poverty Reduction in Tanzania* yang menyatakan bahwa investasi publik mempunyai pengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan melalui alokasi investasi yang secara baik dan tepat sasaran. Sebagai contoh, investasi dalam pendidikan memiliki dampak terhadap pertumbuhan dan kemiskinan di semua wilayah, sedangkan investasi dalam pertanian dan infrastruktur lebih baik dialokasikan di daerah pedesaan. Pada dasarnya pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan melalui belanja daerah khususnya dalam hal bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur merupakan suatu investasi sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Diharapkan juga belanja daerah mampu berdampak langsung ataupun tidak langsung pada pengurangan kemiskinan di daerahnya lewat pembangunan ekonomi yang merata dan hasilnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat khususnya terhadap penduduk miskin. Berdasarkan

latar belakang yang telah diuraikan, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pembangunan dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur**”.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (2015) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan suatu individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak seperti sandang, pangan, dan papan. Asian Development Bank (2006) mendefinisikan kemiskinan menjadi tiga kategori: (1) kemiskinan sumber daya manusia, yang merupakan kurangnya kemampuan manusia yang sangat penting dalam hal melek huruf dan kondisi gizi, (2) kemiskinan pendapatan, yang merupakan kurangnya pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi minimum, (3) kemiskinan absolut, yang merupakan tingkat kemiskinan di bawah kebutuhan kalori minimal ditambah komponen makanan non esensial. Namun Bank Pembangunan Asia juga menekankan bahwa sekarang semakin menyadari bahwa kemiskinan merupakan konsep multidimensi dan harus mencakup semua persyaratan kehidupan manusia yang sangat penting.

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi, sehingga kemiskinan didefinisikan dan diukur dalam banyak cara tergantung dari sisi mana dan bagaimana mendefinisikannya. Oleh karena itu, kemiskinan dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori, yaitu: kemiskinan struktural, kemiskinan alamiah, kemiskinan kultural, dan kemiskinan absolut. Sharp (dalam Kuncoro, 2006) mencoba mengidentifikasi tiga penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidakseimbangan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses di mana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah “garis kemiskinan absolut” tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Meier, 1995). Proses dalam hal ini adalah berlangsungnya kekuatan-kekuatan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Dengan kata lain, pembangunan lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus charge), yaitu perubahan struktur ekonomi atau transformasi ekonomi dari pertanian ke industri atau jasa dan perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan itu sendiri (Kuncoro, 2006).

Teori Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial merupakan suatu proses perubahan sosial yang terencana yang telah didesain untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, dengan menggabungkannya dengan dinamika proses pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial muncul akibat kegagalan pembangunan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kebijakan pembangunan oleh pemerintah yang bisa memberikan dampak menyeluruh terhadap semua aspek kehidupan melalui pemberian berbagai program yang telah terstruktur dan terencana dengan baik yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Secara konseptual pembangunan sosial bisa diartikan sebagai proses pembangunan manusia (human development). Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan (United Nations Development Program, 1995). Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai

tujuan akhir (the ultimate end), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (principal means). Pembangunan manusia memfokuskan perhatiannya pada peningkatan modal manusia (human capital) yang diukur melalui dua indikator utama yaitu pendidikan (misalnya angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) dan kesehatan (misalnya angka harapan hidup).

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu alat kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan nasional. Teori pengeluaran pemerintah didasarkan atas persamaan yang dikembangkan oleh pandangan Keynesian, yaitu : $Y = C + I + G + (X-M)$. Dimana (Y) merupakan pendapatan nasional, (C) merupakan pengeluaran konsumsi dan (G) adalah pengeluaran pemerintah. Berdasarkan persamaan ini menjadi dasar akan relevansi campur tangan pemerintah dalam hal perekonomian., peningkatan atau penurunan dari pengeluaran pemerintah akan secara spesifik mempengaruhi total pendapatan nasional. Semakin besar pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan maka akan meningkatkan pendapatan nasional, begitupun juga sebaliknya.

Keynes dalam analisisnya mengenai kebijakan fiskal dapat diterapkan pada negara yang telah maju dan negara terbelakang. Peranan kebijakan fiskal bagi negara maju adalah untuk menstabilkan laju pertumbuhan. Sedangkan dalam konteks negara terbelakang kebijakan fiskal digunakan untuk memacu laju pembentukan modal. Bila dilihat secara luas kebijakan fiskal sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi khususnya bagi negara terbelakang yang menghadapi problem pembentukan modal (Jinghan, 1996).

Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban atau pernyataan yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya berdasarkan pada teori-teori yang relevan yang ditampilkan, namun belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan dan estimasi data. Berdasarkan latar belakang dan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil hipotesis dalam permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Diduga belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi.
2. Diduga belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan sosial.
3. Diduga pembangunan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
4. Diduga pembangunan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.
5. Diduga belanja daerah berpengaruh secara tidak langsung negatif dan signifikan terhadap kemiskinan melalui pembangunan ekonomi.
6. Diduga belanja daerah berpengaruh secara tidak langsung negatif dan signifikan terhadap kemiskinan melalui pembangunan sosial.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode PLS (Partial Least Square) sebagai alat untuk menjawab rumusan masalah diatas. Partial Least Square merupakan salah satu metode alternatif SEM (Structural Equation Modelling) dengan menggunakan pendekatan berbasis varians atau komponen yang berorientasi pada prediksi model. Wright dalam Jogiyanto (2011) mengatakan bahwa Structural Equation Modelling (SEM) merupakan teknik analisis multivariat yang dikembangkan untuk menguji dan mengestimasi hubungan kausal dengan mengintegrasikan analisis faktor dan analisis jalur. SEM mampu menganalisis model yang melibatkan latent variable (variabel laten) yang dibentuk oleh satu atau beberapa indikator observed variables (variabel terukur/teramati) yang tidak dapat dilakukan oleh analisis regresi, analisis jalur, dan analisis faktor konfirmatori. Dalam pengujian dengan menggunakan PLS, terdapat beberapa langkah yang ditempuh seperti gambar berikut

Gambar 3.1 : Langkah-langkah dalam pengujian PLS



Sumber: diolah penulis

Perancangan inner model pada PLS tidak hanya berbasis pada teori namun juga dapat berupa hasil penelitian empiris. PLS tidak mengharuskan landasan teori yang kuat dalam merancang model. Menilai inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antar konstruk, nilai signifikansi, dan R-square dari model penelitian. Sedangkan perancangan outer model atau pengukuran model merupakan penilaian terhadap reliabilitas dan validitas variabel penelitian. Ada tiga kriteria untuk menilai outer model, yaitu convergent validity, discriminant validity, dan composite reliability. Gambar pengembangan diagram jalur pada model penelitian ini, dapat dilihat secara jelas pada gambar 3.2:

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk menguji sejauh mana indikator dapat merefleksikan variabel latennya. Dalam uji validitas terdapat dua macam uji yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan.

1. Validitas Konvergen

Uji validitas konvergen digunakan untuk mengetahui apakah indikator-indikator dalam konstruk memiliki korelasi yang tinggi. Uji validitas konvergen konstruk indikator refleksif dengan program SmartPLS 3.0 dapat dilihat dari nilai loading factor untuk tiap indikator konstruk dan nilai average variance extracted (AVE). Pengujian pada penelitian yang bersifat exploratory nilai loading factor harus lebih dari 0,60 dan nilai AVE harus lebih dari 0,50. Hasil uji validitas konvergen pada model penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 : Hasil Uji Validitas Konvergen

Indikator	Hasil Evaluasi		Keterangan
	Loading Factor	AVE	
Belanja Pendidikan (X1.1)	0,760	0,779	Valid
Belanja Kesehatan (X1.2)	0,946		Valid
BelanjaInfrastruktur (X1.3)	0,930		Valid
PDRB (Y1.1)	0,919	0,597	Valid
PDRB Perkapita (Y1.2)	0,707		Valid
Kontribusi Sektor Industri (Y1.3)	0,669		
Angka Harapan Hidup (Y2.1)	0,880	0,868	Valid
Angka Melek Huruf (Y2.2)	0,968		Valid
Rata-rata Lama Sekolah (Y2.3)	0,945		Valid
Tingkat Kemiskinan (Y3.1)	0,963	0,829	Valid
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y3.2)	0,949		Valid
Jumlah Penduduk Miskin (Y3.4)	0,812		Valid

Sumber : Lampiran (data diolah)

Berdasarkan hasil uji validitas konvergen dapat dilihat bahwa semua indikator telah memenuhi persyaratan uji. Seluruh indikator dari variabel memiliki nilai loading factor diatas 0,60 sehingga dapat disimpulkan indikator-indikator tersebut telah memenuhi persyaratan uji validitas konvergen. Selain itu nilai AVE dari setiap variabel juga menunjukkan nilai diatas 0,50 sehingga semua variabel telah memenuhi persyaratan uji validitas konvergen.

2. Validitas Diskriminan

Uji validitas diskriminan digunakan untuk mengetahui apakah indikator-indikator dalam konstruk yang berbeda tidak memiliki korelasi yang tinggi. Uji validitas diskriminan konstruk indikator refleksif dengan program SmartPLS 3.0 dengan membandingkan nilai dari akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model. Pengujian untuk validitas diskriminan nilai dari akar AVE harus lebih dari nilai skor korelasi antar variabel laten. Hasil uji validitas diskriminan pada model penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 : Nilai Perbandingan Akar AVE dengan Korelasi Variabel Laten

Variabel	AVE	Akar AVE	Skor Korelasi antar Variabel Laten			
			X1	Y1	Y2	Y3
X1	0,779	0,882	1,000			
Y1	0,597	0,772	0,717	1,000		
Y2	0,868	0,931	0,128	0,422	1,000	
Y3	0,829	0,910	-0,027	-0,285	-0,828	1,000

Sumber : Lampiran (data diolah)

Dari hasil uji validitas diskriminan diatas terlihat bahwa semua variabel laten lulus uji karena nilai akar AVE-nya lebih besar dari nilai skor korelasi antar variabel laten.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan indikator dalam mengukur konstruk. Uji reliabilitas konstruk indikator reflektif dengan program SmartPLS 3.0 dengan dua cara yaitu dengan Cronsbach's Alpha dan Composite Reliability. Pengujian untuk reliabilitas, nilai Cronsbach's Alpha dan Composite Reliability harus lebih dari 0,70. Hasil uji reliabilitas pada model penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 : Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronsbach's Alpha	Composite Reliability	Kesimpulan
Belanja Daerah	0,865	0,913	Reliabel
Pembangunan Ekonomi	0,739	0,813	Reliabel
Pembangunan Sosial	0,924	0,952	Reliabel
Kemiskinan	0,894	0,935	Reliabel

Sumber : Lampiran (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Cronsbach's Alpha* dan *Composite Reliability* semua indikator diatas 0,70 maka variabel dinyatakan reliabel.

Pengujian Goodnes of Fit Model Struktural (Inner Model)

Pengujian goodness of fit model untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel eksogen dalam menjelaskan variabel endogen. Goodness of fit model dalam analisis PLS dilakukan dengan melihat nilai Q-Square predictive relevance (Q²). Nilai Q² mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q² > 0 menunjukkan model memiliki predictive relevance, sebaliknya jika Q² < 0 menunjukkan model tidak memiliki predictive relevance. Hasil pengolahan data terkait nilai Goodness of fit model dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.4 : Hasil Goodness of fit model

Variabel Endogen	Nilai R ²
Pembangunan Ekonomi	R ₁ ² = 0,515
Pembangunan Sosial	R ₂ ² = 0,016
Kemiskinan	R ₃ ² = 0,694
$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2) (1 - R_2^2) (1 - R_3^2)$ $Q^2 = 1 - (1 - 0,515) (1 - 0,016) (1 - 0,694) = \mathbf{0,853}$	

Sumber : Lampiran (data diolah)

Hasil perhitungan diatas menghasilkan nilai Q-Square predictive relevance (Q²) yang bernilai sebesar 0,853 atau 85,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa keragaman variabel yang dapat dijelaskan oleh model tersebut adalah 85,3%. Sedangkan 14,7% sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Dengan demikian, model struktural yang dibentuk cukup sesuai memberikan informasi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-statistik pada masing-masing jalur pengaruh langsung secara parsial. Tabel berikut menyajikan hasil pengujian hipotesis:

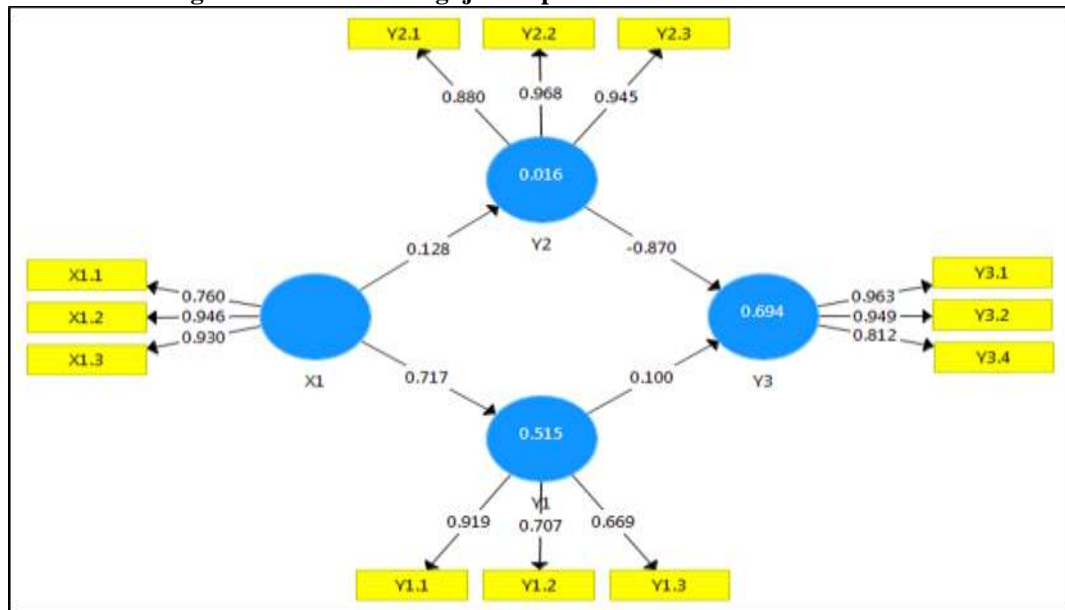
Tabel 4.5 : Hasil Pengujian Hipotesis dalam Inner Model

Variabel Bebas	Variabel Terikat	Koefisien Jalur	T-statistik	Keterangan
Belanja Daerah (X1)	Pembangunan Ekonomi (Y1)	0,717	13,762	Signifikan
Belanja Daerah (X1)	Pembangunan Sosial (Y2)	0,128	2,077	Signifikan
Pembangunan Ekonomi (Y1)	Kemiskinan (Y3)	0,100	4,052	Signifikan
Pembangunan Sosial (Y2)	Kemiskinan (Y3)	-0,870	31,364	Signifikan

Sumber ; Lampiran (data diolah)

Hasil pengujian hipotesis juga dapat dilihat pada diagram jalur yang ditampilkan sebagai berikut :

Gambar 4.1 : Diagram Jalur Hasil Pengujian Hipotesis dalam Inner Model



Sumber : Lampiran (diolah penulis)

Berdasarkan tabel dan diagram diatas, maka dapat dinyatakan hasil pengujian hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh belanja daerah terhadap pembangunan ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis koefisien pengaruh langsung antara variabel belanja daerah dengan pembangunan ekonomi . Untuk belanja daerah terhadap pembangunan ekonomi didapatkan nilai koefisien pengaruh langsung sebesar 0,717 dan t-statistik sebesar 13,762. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis pertama bahwa variabel belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembangunan ekonomi.

2. Pengaruh belanja daerah terhadap pembangunan sosial.

Berdasarkan hasil analisis koefisien pengaruh langsung antara variabel belanja daerah dengan pembangunan sosial . Untuk belanja daerah terhadap pembangunan sosial didapatkan nilai koefisien pengaruh langsung sebesar 0,128 dan t-statistik sebesar 2,077. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis kedua bahwa variabel belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembangunan ekonomi.

3. Pengaruh pembangunan ekonomi terhadap kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis koefisien pengaruh langsung antara variabel pembangunan ekonomi dengan kemiskinan. Untuk pembangunan ekonomi terhadap kemiskinan didapatkan nilai koefisien pengaruh langsung sebesar 0,100 dan t-statistik sebesar 4,052. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis ketiga bahwa variabel pembangunan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan.

4. Pengaruh pembangunan sosial terhadap kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis koefisien pengaruh langsung antara variabel pembangunan sosial dengan kemiskinan. Untuk pembangunan sosial terhadap kemiskinan didapatkan nilai koefisien pengaruh langsung sebesar -0,870 dan t-statistik sebesar 31,364. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis keempat bahwa variabel pembangunan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan.

5. Pengaruh belanja daerah terhadap kemiskinan melalui pembangunan ekonomi

Berdasarkan pengujian hipotesis sebelumnya, belanja daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembangunan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga dapat dikatakan variabel belanja daerah mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pembangunan ekonomi. Hasil pengaruh tidak

langsung dapat ditunjukkan dari perkalian sebesar $(0,717) \times (0,100) = 0,071$. Namun hasil tersebut tidak sesuai dengan hipotesis kelima bahwa variabel belanja daerah memiliki pengaruh tidak langsung signifikan dan negatif terhadap kemiskinan melalui pembangunan ekonomi.

6. Pengaruh belanja daerah terhadap kemiskinan melalui pembangunan sosial

Berdasarkan pengujian hipotesis sebelumnya, belanja daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pembangunan sosial. Sedangkan pembangunan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga hasil tersebut sesuai dengan hipotesis kelima bahwa variabel belanja daerah memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kemiskinan signifikan dan negatif melalui pembangunan sosial. Hasil pengaruh tidak langsung dapat ditunjukkan dari perkalian sebesar $(0,128) \times (-0,870) = -0,111$

Pembahasan dan Implikasi Penelitian

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini sesuai dengan pandangan Keynesian yang menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan perekonomian melalui kontribusinya dalam peningkatan output. Selain itu dalam model pertumbuhan endogen juga menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dengan asumsi pengeluaran tersebut digunakan untuk kegiatan yang produktif misalnya melalui pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Dalam proses pembangunan, sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Peran pemerintah melalui belanja pendidikan diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (human capital) yang dibutuhkan sebagai modal penting pembangunan. Peran pendidikan disini yaitu kemampuannya dalam meningkatkan produktivitas masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dasar, keterampilan khusus, dan kemampuan menyerap perkembangan teknologi. Dengan adanya peningkatan produktivitas akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan output yang lebih banyak sehingga akan berdampak pada peningkatan output agregat yang dihasilkan suatu daerah.

Tidak hanya pendidikan, kesehatan juga dibutuhkan secara khusus untuk menjaga produktivitas masyarakat tetap terjaga. Kesehatan yang buruk akan berdampak pada semangat dan etos kerja masyarakat yang rendah sehingga dapat mengakibatkan produktivitas masyarakat menjadi menurun. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah melalui belanja kesehatan guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan yang terjangkau dan memadai.

Pembangunan ekonomi juga tidak terlepas oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Adanya peran pemerintah melalui belanja infrastruktur bisa menjadi sarana penting guna meningkatkan pembangunan ekonomi melalui perannya dalam menunjang kelancaran dalam aktivitas perekonomian daerah. Infrastruktur juga sebagai insentif investor dalam menanamkan modalnya di suatu daerah dikarenakan infrastruktur yang memadai dapat mengurangi biaya produksi yang dikeluarkan. Solow dalam model pertumbuhannya juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada tingkat faktor-faktor produksi yang terdiri dari tenaga kerja dan akumulasi modal serta adanya teknologi.

Penjelasan diatas senada dengan penelitian Nurudeen dan Abdullahi Usman (2010) yang menyatakan pengeluaran pemerintah dalam infrastruktur dan kesehatan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi hasil berbeda ditunjukkan dalam pengeluaran pendidikan dimana berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun dalam penelitian selanjutnya oleh Njenga (2013) membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memacu pertumbuhan ekonomi, terutama dalam investasi pendidikan yang dialokasikan dalam angkatan kerja yang dapat menciptakan produktivitas yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pembangunan Sosial

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap pembangunan sosial. Belanja daerah dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam proses pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan sumber daya manusia. Melalui pendidikan, akan dapat mendorong kemampuan baca tulis dan peningkatan keterampilan dasar, serta kemampuan menyerap perkembangan teknologi yang

berkembang di masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah daerah melalui belanja pendidikan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya misalnya melalui pembangunan sekolah, pemberian beasiswa pendidikan, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Kualitas pendidikan yang dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah akan dapat meningkatkan tingkat pendidikan di daerahnya yang ditandai dengan adanya peningkatan indikator pendidikan seperti angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Tidak hanya pendidikan, kesehatan juga menentukan keberhasilan pembangunan sosial dalam suatu daerah. Peran pemerintah melalui alokasi belanja kesehatan diharapkan mampu untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas penunjang lainnya akan dapat meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat yang dicerminkan oleh peningkatan usia harapan hidup dan penurunan angka kematian.

Hasil penelitian Richardson (2014) juga mengungkapkan adanya efek pengeluaran pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengeluaran pemerintah dalam pendidikan dan kesehatan secara khusus memiliki dampak yang cukup besar dalam mempengaruhi pembangunan sumber daya manusia. Hal senada juga diungkapkan Ehimare, et al (2014) yang menyatakan tingkat pembangunan sumber daya manusia direfleksikan oleh tingkat kesehatan dan pendidikan suatu bangsa. Oleh karena itu, dia menyarankan adanya komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas output pendidikan dan kesehatan.

Pengaruh Pembangunan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Dengan demikian hasil tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Albert O Hirschman yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai efek trickle down dimana mengasumsikan pertumbuhan akan menetes ke bawah dalam bentuk pekerjaan dan kesempatan ekonomi yang lebih luas yang dapat menciptakan perluasan distribusi manfaat ekonomi dan sosial yang selanjutnya dapat mengurangi kemiskinan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi selama ini tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan. Tingginya tingkat pembangunan ekonomi yang berada di kabupaten/kota Jawa Timur belum memberikan hasil yang positif untuk pengurangan kemiskinan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini masih bersifat eksklusif yang hanya memperhitungkan aspek pertumbuhan ekonomi tetapi kurang memperhitungkan penyerapan tenaga kerja sehingga menimbulkan pengangguran yang tinggi dan kemiskinan yang meningkat.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah di kabupaten/kota di Jawa Timur perlu untuk menata ulang kebijakan pembangunan ekonominya agar mempunyai pengaruh dalam penanggulangan kemiskinan. Pembangunan inklusif merupakan salah satu konsep pembangunan yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Dalam pembangunan inklusif yang menjadi tujuan utama adalah upaya untuk mengurangi kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan inklusif harus menyangkut tiga aspek penting yaitu keberhasilan dalam meningkatkan kesempatan kerja secara luas terhadap masyarakat, keberhasilan dalam memberikan jaminan akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi, dan ketersediaan jaring pengaman sosial. Untuk memenuhi ketiga aspek ini pemerintah perlu mengatasi berbagai permasalahan seperti masalah kurangnya lapangan pekerjaan, aksesibilitas yang rendah terhadap fasilitas-fasilitas publik seperti infrastruktur, serta keterbatasan jaring pengaman sosial.

Pengaruh Pembangunan Sosial terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan sosial mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Pembangunan sosial yang direfleksikan oleh dua indikator penting yaitu pendidikan dan kesehatan menghendaki adanya keterkaitan yang kuat dalam mengurangi kemiskinan. Pembangunan sosial dalam hal ini mencakup upaya perbaikan derajat kesehatan, tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk.

Berdasarkan hal tersebut maka salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan adalah upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pengaruh pendidikan dalam mengurangi kemiskinan yaitu mekanismenya dalam

mempengaruhi tingkat pendapatan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik sehingga memiliki standar hidup yang lebih baik dan dapat terhindar dari kemiskinan. Sarwar (2011) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu pendidikan harus dijadikan program-program utama dalam proses pengentasan kemiskinan.

Tidak hanya pendidikan, pemerintah juga memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan bagian penting dari pembangunan suatu daerah. Tingkat kesehatan yang baik dari masyarakat dapat menentukan tingkat produktivitas masyarakat, kesehatan yang lebih baik dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam bekerja untuk meningkatkan output dan penghasilannya. Sulistyowati (2013) juga mengungkapkan bahwa kesehatan mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kemiskinan melalui Pembangunan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara tidak langsung positif dan signifikan belanja daerah terhadap kemiskinan melalui pembangunan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang diarahkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi belum secara paralel efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Laabas (2004) yang menyebutkan bahwa kebijakan publik mempengaruhi kemiskinan secara tidak langsung melalui dampaknya terhadap pertumbuhan distribusi pendapatan. Keadaan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah lewat belanja daerah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi belum mampu menyentuh seluruh elemen masyarakat khususnya penduduk miskin. Hal ini bisa dikarenakan kebijakan fiskal pemerintah yang kurang pro terhadap penduduk miskin, sehingga penduduk miskin tidak merasakan adanya efek yang cukup besar hasil dari pembangunan yang diupayakan pemerintah daerah. Oleh karena itu diperlukan upaya pemerintah dalam memperbaiki distribusi pendapatan khususnya melalui kebijakan fiskal yang pro terhadap kelompok miskin.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kemiskinan melalui Pembangunan Sosial

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara tidak langsung belanja daerah terhadap kemiskinan melalui pembangunan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal melalui belanja daerah yang diarahkan untuk meningkatkan pembangunan sosial dapat secara paralel dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam menanggulangi kemiskinan yaitu dengan meningkatkan belanja daerah.

Pembangunan sosial yang bertumpu pada pembangunan manusia (human development) bisa menjadi hal yang efektif guna mengatasi permasalahan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan yang berkembang pada tahun 90-an yaitu paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia. Secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat atau individu yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Setidaknya terdapat dua indikator utama yang perlu diperhatikan pemerintah sehubungan dengan upayanya dalam meningkatkan pembangunan manusia yaitu pendidikan dan kesehatan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap pembangunan dan kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Timur. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Belanja daerah mempunyai pengaruh dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Peran belanja daerah dalam pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan output yang dihasilkan suatu daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
2. Peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sosial salah satunya yaitu menyediakan anggaran belanja daerah. Dalam penelitian diketahui bahwa belanja daerah dapat meningkatkan pembangunan sosial khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan yang

mampu untuk meningkatkan pembangunan sosial melalui adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu langkah awal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Diketahui dalam penelitian ini pembangunan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan (tidak sesuai hipotesis). Hal ini disebabkan oleh pembangunan ekonomi di Jawa Timur masih bersifat eksklusif yang hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan penyerapan tenaga kerja sehingga menimbulkan pengangguran yang tinggi dan kemiskinan yang meningkat.
4. Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang tidak hanya dipandang sebagai permasalahan ekonomi saja atau kurangnya pendapatan. Oleh karena itu dalam mengatasi permasalahan kemiskinan diperlukan upaya dalam pembangunan sosial. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pembangunan sosial yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan secara khusus dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang dapat berguna untuk meningkatkan standar hidup masyarakat khususnya bagi penduduk miskin untuk keluar dari jurang kemiskinan.
5. Diketahui dalam penelitian ini belanja daerah berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pembangunan ekonomi positif dan signifikan. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal disebabkan oleh beberapa penyebab diantaranya kebijakan publik yang kurang pro terhadap penduduk miskin sehingga hasil dari pembangunan tidak bisa dinikmati secara maksimal oleh penduduk miskin.
6. Kebijakan publik melalui belanja daerah yang diarahkan untuk meningkatkan pembangunan sosial dapat secara paralel dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Pembangunan sosial yang bertumpu pada pembangunan manusia (human development) bisa menjadi hal yang efektif guna mengatasi permasalahan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas masyarakat penduduk miskin. Dengan adanya peningkatan produktivitas, terdapat peluang lebih besar penduduk miskin untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi yang dapat digunakan untuk meningkatkan standar hidupnya.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi dan efektivitas anggaran belanja daerah terhadap program-program yang dianggap produktif dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Misalnya dalam bidang pendidikan melalui program peningkatan kualitas tenaga kerja dengan mendirikan balai latihan kerja yang dapat digunakan untuk kegiatan peningkatan keterampilan dan pengetahuan calon tenaga kerja.
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tersedia guna meningkatkan pembangunan sosial lebih baik. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai program, misalnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan dengan melaksanakan kegiatan seperti seminar, workshop, dan pendidikan informal bagi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan yang nantinya dapat berguna untuk meningkatkan kualitas output yang dihasilkan.
3. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi agar terciptanya pemerataan distribusi pendapatan yang lebih baik. Pembangunan ekonomi perlu diarahkan terhadap pembangunan yang inklusif yaitu meningkatkan partisipasi seluruh kelompok masyarakat dalam aktivitas pembangunan di Jawa Timur satunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan hendaknya memprioritaskan dalam pembangunan sumber daya manusia khususnya terhadap kelompok penduduk miskin. Pembangunan sumber daya manusia bisa dilaksanakan melalui berbagai program, misalnya dalam program pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dengan meningkatkan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan pembangunan sekolah-sekolah di pedesaan yang sulit terjangkau. Selain itu kegiatan sosialisasi pentingnya pendidikan juga sangat dibutuhkan, mengingat kebanyakan penduduk miskin sering mengabaikan pendidikan bagi anak mereka

dikarenakan keterbatasan dana dan ketidakpercayaan mereka terhadap pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

5. Pemerintah hendaknya merancang kebijakan publik yang pro terhadap penduduk miskin. Hal ini mengingat selama ini kebijakan publik kurang memberikan manfaat yang besar terhadap penduduk miskin misalnya terkait pembangunan infrastruktur yang masih terfokus di perkotaan. Oleh karena itu pemerintah perlu meningkatkan program-program yang memberikan manfaat besar terhadap penduduk miskin, seperti Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) dengan meningkatkan pembangunan jalan di pedesaan, dan sarana prasarana lainnya seperti saluran irigasi dan sanitasi.
6. Pemerintah daerah dalam merancang kebijakan anggarannya perlu memprioritaskan program-program pembangunan sosial yang secara tidak langsung juga dapat mengatasi kemiskinan. Kebijakan fiskal dalam pembangunan sosial bisa diarahkan melalui program peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin. Program peningkatan akses pendidikan bagi penduduk miskin bisa dilakukan melalui pemberian beasiswa kepada penduduk miskin dengan berbagai jenjang dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di kawasan terpencil. Sedangkan dalam program peningkatan akses kesehatan bagi penduduk miskin bisa melalui peningkatan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pemberian vitamin dan obat gratis, serta peningkatan akses informasi dan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*, edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2015. *Tingkat kemiskinan dan Prosentase penduduk Miskin*. BPS. Jawa Timur.
- Ghozali, Imam. 2006. *Structrural Equation Modelling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Jhingan, 1996. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta : Rajawali Press
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPPAMPYKPN
- Laabas, Belkacem. 2004. *Impact of Public Policies on Poverty, Income Distribution and Growth. Paper prepared in the context of the IFPRI/API Collaborative Research Project: " Public Policy and Poverty Reduction in the Arab Region"*.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2010. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mehmood, Rashid., and Sara Sadiq. 2010. *The Relationship between Government Expenditure and Poverty: A Cointegration Analysis*. Romanian Journal of Fiscal Policy Volume 1, Issue 1, July-December 2010, Pages 29-37
- Siregar, Hermanto., dan Dwi Wahyuniarti. 2007. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Jurnal Ekonomi Politik dan Keuangan
- Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C. 2011. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi 11*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Sulistyowati, Niken., dkk. 2013. *Dampak Investasi Pendidikan terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. jurnal.ut.ac.id diakses terakhir pada 5 April 2016
- Widodo, Adi dan Waridin dan Johanna Maria K. 2011. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Juli 2011, Volume 1, Nomor 1